

LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Pengukuhan UPK Duta Harta Lestari



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012763.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DUTA HARTA LESTARI**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIWABRATA PAGORCY,SH.MKN , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh SIWABRATA PAGORCY,SH.MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DUTA HARTA LESTARI tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017081651100878 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DUTA HARTA LESTARI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN DUTA HARTA LESTARI
Berkedudukan di KABUPATEN BULELENG, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh SIWABRATA PAGORCY,SH.MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2017
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Buleleng

SIWABRATA PAGORCY, SH., M.Kn

CS Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012763.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DUTA HARTA LESTARI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
RUZZI BUNSIAYA	5108041101620002	PENGURUS	KETUA
SANG PUTU SUYADNYANA	5108042109710001	PENGURUS	SEKRETARIS
KETUT SUWITRI	5108044102620003	PENGURUS	BENDAHARA
I PUTU SUPARNAYA	5108041104600001	PENGAWAS	KETUA
SANG AYU KETUT SUCIANI	5108045008710001	PENGAWAS	ANGGOTA
LUH SARTINI	5108044812650001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Kabupaten Buleleng



SIWABRATA PAOROCY, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/446/REK/DPMPSTSP/2022
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng

di -
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 809/UN48.13.1/DL/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Perihal Permohonan Data dan Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Putu Lisyia Monica Utama
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BD. Dauh Munduk, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
Bidang / Judul : Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah UPK.DAPM Sawan Sejahtera dengan Penerapan Sistem Tanggung Renteng di Kecamatan Sawan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

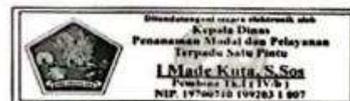
Lamanya : 6 bulan (12 Mei 2022- 01 Oktober 2022)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 13 MEI 2022



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

1. Informan : Made Suparta

**(Ketua Unit Pengelola Kegiatan Duta Harta Lestari
Kecamatan Banjar)**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon ijin untuk mewawancari bapak.

I : Om swastyastu selamat pagi, nggih silahkan

P : Pertama – tama mohon ijin bapak untuk memperkenalkan diri bapak terlebih dahulu.

I : Nggih, nama saya Made Suparta, saya berasal dari Desa Kayu Putih

P : Sejak kapan bapak menjabat menjadi ketua di UPK Duta Harta Lestari?

I : Sejak tahun 2003

P : Bagaimana Sejarah terbentuknya UPK Duta Harta Lestari ini, nggih pak?

I : Nggih dulu di Indonesia sebelum Bernama UPK DAPM , Namanya adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tetapi pada saat itu di Bali belum mengenai proyek untuk PPK tersebut dikarenakan perekonomian di Bali masih dibilang baik. Kemudian terjadinya BOM Bali pada tahun 2002 dan menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga pada program PPK pase 2 baru diluncurkan bantuan untuk provinsi Bali sebesar 1.000.000.000. Kemudian Pada tahun 2003 Dari masing – masing desa ada perwakilan 1 orang untuk menjadi pengurus UPK , di Kecamatan Banjar

terdapat 17 desa, sehingga jumlah bakal calon sebanyak 17 orang. setelah ada bakal calon selanjutnya dinilai/ ditest di kecamatan menjadi 6 orang , dan kemudian melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD), karena yang dibutuhkan hanya 3 pengurus yakni ketua, sekretaris, dan bendahara maka dari ke 6 orang itu hanya dapat dipilih 3 orang dan betul – betul demokratis pada saat itu, selanjutnya ketiga pengurus yang telah terpilih setiap tahun selalu melakukan evaluasi di MAD dari jaman PPK, Seiring berjalannya waktu namanya terus berubah dari PPK, PNPM Pedesaan, dan sampai sekarang menjadi UPK DAPM. Karena DAPM waktu itu masih ada antara Bumdes,PT, dan Persatuan Berbadan Hukum (PBH) , Kami di Kabupaten Buleleng lebih banyak memilih PBH (Persatuan Berbadan Hukum) bergerak waktu pendiriannya niki wajib dibentuk oleh PBB (Badan Pengurus Perkumpulan) dan PB (Badan Pengawas) dibentuk oleh 6 orang, karena dengan PBH maka kami diijinkan untuk pengelolaanya, tergantung dari kesepakatan MK (Musyawarah Kecamatan). Untuk perkumpulan duta harta lestari berdiri tanggal 21 February 2017 dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya.

P : Bagaimana Struktur Organisasi UPK DAPM Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar Pak?

I : Berdasarkan keputusan forum Musyawarah Antar Desa (MAD) susunan pengurus niki dimulai dari BPP (Badan Pengawas Perkumpulan), UPK (Unit Pengelola Kegiatan), Badan Pengawas (BP) UPK, dan Tim Verifikasi.

P : Bagaimana tugas dan tata kerja UPK DAPM Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar ?

I : Untuk tugas dan tata kerja dari UPK Duta Harta Lestari niki tertuang didalam

buku pedoman anggaran rumah tangga perkumpulan Duta Harta Lestari lengkap ada disana mulai dari Tugas BPP,BP,UPK,dan Tim verifikasi nanti tiang berikan bukunya niki.

P : Baik bapak terimakasih, selanjutnya Apa saja kegiatan dari UPK DAPM Duta Harta Lestari?

I : Untuk saat ini Kegiatan pada UPK Duta Harta Lestari hanya melakukan kegiatan ekonomi produktif, termasuk di dalamnya adalah usaha simpan pinjam dan usaha ekonomi lainnya.

P : Dana bergulir yang dikelola oleh UPK berasal dari mana pak nggih, dan bagaimana alur pencairan Dana hingga sampai kepada UPK?

I : Pendanaan dari UPK DAPM Duta Harta Lestari niki dari dana BLM PKK dan PNPM Mandiri (Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan yang bersumber dari APBD melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) ke Kecamatan. Penyalurannya niki adalah aliran dana PNPM Mandiri Pedesaan dari rekening kolektif UPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

P : Didalam penyaluran dana bergulir untuk kelompok SPP niki kan tadi saya dengar dari pak dewa selaku bendahara menyatakan bahwa adanya perangkan nggih pak untuk kelompok SPP niki , bisa dijelaskan nggih pak maksudnya seperti apa?

I : Saya jelaskan nggih dik, dari rangking sekian ternyata dana yang kita punya hanya bisa sampai rangking 4 itu saja yang bisa direalisasikan, cukup itu dulu

sistemnya sehingga yang dilakukan kemarin- kemarin itu masyarakat ikut berproses ada penggalian gagasan, sistemnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu? Nah kebutuhan inilah yang dikawal oleh wakil-wakil desanya untuk dikompetisikan di UPK, sehingga mana yang menjadi perengkingan dan kebutuhan sesuai presentasi dia sudah disepakati oleh 17 desa ini yang menjadi rangking 1 berarti itu yang mendapat bantuan. Itu sistemnya tetep melibatkan masyarakat karena ini program pemberdayaan belum masuk kerana hukum dan lebih banyak merembug”.

P : Untuk kelompok SPP ini apakah memiliki 1 usaha yang dikelola secara bersama-sama atau setiap anggotanya memiliki usaha masing – masing pak?

I : Ada 2 jenis kelompok sebenarnya disetiap UPK ya, diantaranya yakni kelompok yang memiliki kesamaan usaha dan kelompok usaha bersama. kebetulan dikecamatan Banjar kebanyakan kelompok itu memiliki usaha sendiri dengan berbagi macam usaha, dulu dikaliamas ada kelompok yang memiliki usaha bersama tapi karena sudah mapan jadi dilepas dan sekarang kebanyakan kelompok yang memiliki kesamaan usaha.

P : Dasar hukum apa yang terkait dalam peraturan yang terkait dalam peraturan yang menjadi landasan hukum dari DAPM?

I : Dasar hukumnya baik dari pelaksanaan maupun regulasinya dipayungi melalui peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan pada tanggal 23 juli 2013 diadakannya rapat kelompok kerja pengendalian PNPM Mandiri yang memutuskan tentang 3 bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan reundang – undangan yang berlaku diantaranya koprasia,Perkumpulan Badan Hukum (PBH), Perseroan Terbatas

(PT), namun untuk UPK dikabupaten Buleleng hanya memilih 1 bentuk badan hukum yakni PBH (Perkumpulan Badan Hukum).

P : Bagaimana tahap perencanaan yang bapak buat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada UPK Duta Harta Lestari?

I : Dalam memulai suatu pekerjaan memang diawali dengan perencanaan terlebih dahulu agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Nah Tahap perencanaan yang dilakukan UPK DAPM Duta Harta Lestari dengan menyampaikannya melalui musyawarah kecamatan (MK) untuk dimintakan persetujuan, sebelumnya harus dibuatkan asumsi sehingga memperkirakan antara pendapatan dan pengeluaran, akhirnya bisa Menyusun perencanaan keuangan.

P : Bagaimana tahap pelaksanaan keuangan pada UPK DAPM Duta Harta Lestari ini pak nggih?

I : Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada UPK DAPM Duta Harta Lestari setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) dilakukan, dimana nantinya utusan dari desa mengumumkan hasil musyawarah mengenai perguliran ke desa masing-masing dan nantinya berdasarkan hasil dari MAD tersebut kelompok yang disepakati menjadi rangking akan membuat dokumen perguliran sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama.

P : Dan selanjutnya bagaimana mengenai tahap pelaksanaan keuangan pada UPK DAPM Duta Harta Lestari ini pak:

I : Pencatatan yang kami lakukan selama ini terbagi menjadi beberapa prosedur yang terdiri dari pemisah administrasi pengelolaan, pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan, serta terkait administrasi pengelolaan BLM dan dana bergulir . Didalam prosedur itu ada masing – masing staf maupun pengurus

yang mengelola administrasi tersebut.

P : Pada tahap pelaporan adanya laporan arus dana nggih pak, apa saja yang tercantum didalam laporan arus dana tersebut?

I : Laporan arus dana nike menggambarkan sumber, penggunaan, dan perubahan dana. Sumber dana yang dimaksud pada UPK nike adalah semua dana yang masuk ke UPK selain dana bergulir , seperti halnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan DOK (Dana Operasional Kegiatan), termasuk juga dengan penerimaan bunga bank dari rekening BLM dan rekening DOK (Dana Operasional Kegiatan). Dan penggunaan dananya nike terkait dengan penyaluran BLM Kedesa, sedangkan perubahan dana pada UPK adalah perubahan posisi dimana terletak pada saldo awal dan saldo akhir dana.

P : Bagaimana UPK Duta Harta Lestari ini melakukan pertanggungjawabannya kepada stakeholder?

I : Setiap tahun kita menyampaikan pertanggungjawaban sekecamatan melalui Musyawarah Kecamatan (MK) yang diwakili dari masing masing desa sejumlah 5 orang (Perbekel, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan 3 orang perwakilan kelompok SPP disamping itu pula kita mengundang Camat dan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Buleleng, kemudian kami menyampaikan laporan keuangan yang telah kami rancang secara terbuka dan jujur, dimana segala hal yang menyangkut dengan keuangan ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan dana bergulir kelompok SPP. Pada intinya semuanya baik itu kelompok SPP maupun perwakilan pengurus lainnya mengetahui secara langsung berapa dana yang diterima dan berapa dana yang digulirkan secara transparan.

P : Apa dampak pengelolaan DAPM dengan menggunakan sistem tanggung renteng?

I : Dampak dari adanya tanggung renteng dalam pengelolaan DAPM nikel seperti dua mata pisau apabila tanggung renteng bisa dijalankan dan mau dipertanggungjawabkan oleh kelompok dampaknya bagus bagi UPK, dan apabila salah satu anggota tidak mau membayar atau curang dan anggota yang lain tidak mau membayar ,...ya otomatis akan menyebabkan kemacetan.



2. Informan : Drh. Ketut Supartayasa

**(Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan Duta Harta Lestari
Kecamatan Banjar)**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon ijin untuk mewawancari bapak.

I : Om swastyastu selamat pagi, nggih.

P : Sebelumnya mohon ijin bertanya bapak nggih, jabatan bapak disini sebagai apa nggih, dan sejak kapan bapak mulai bekerja di UPK Duta Harta Lestari ini?

I : tyang jabatan nya sebagai seketaris, sama seperti rekan-rekan yang lainnya pada tahun 2003.

P : Nggih pak, saya langsung saja bertanya nggih. Berapa jumlah kelompok SPP tiga tahun terakhir dan berapakah jumlah anggota disetiap kelompoknya?

I : Untuk jumlah kelompok yang dikelola 3 tahun terakhir yakni sebanyak 144 kelompok pada 17 desa dikecamatan Banjar.

P : Kelompok SPP bergerak di dalam bidang apa saja?

I : Aneka Usaha nike mulai dari petani,Dagang,pengerajin,penganyam,lebih banyak di industry mikro kecil (IMK).

P : Bagaimana Prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman pada UPK DAPM ?

I : Pertama kelompok membuat proposal di tanda tangani oleh kepala desa

dengan melampirkan ktp dan kartu keluarga, masing masing anggota ADART kelompok dan diajukan ke UPK selanjutnya UPK akan memverifikasi. Prosedur pengembalian pinjaman yakni uang yang dipinjam dikumpulkan dikelompok dan dibawa oleh ketua kelompok kemudian dibawa untuk disetor ke UPK.

P : Berapakah jumlah dana yang diberikan setiap kelompoknya?

I : Masing-masing kelompok mendapat uang sesuai dengan kemampuan anggota didalam membayar. Kelompok dikasik pinjaman Rp.10.000.000 dengan masing – masing anggotanya mendapatkan Rp.1.000.000 untuk 10 orang. Pinjaman maksimal untuk kelompok yang sudah lama bergabung yakni sebesar 10.000.000 , namun sekarang karena covid maksimal pinjaman saat ini menjadi Rp. 5.000.000 perorang (tidak merata) dalam jangka waktu 3 tahun. Dari kami UPK memberikan bunga kepada kelompok SPP sebesar 1,5% menetap, terkadang kelompok di SPP bayarnya 2% sisanya lagi 0,5% dikelola dikelompok menjadi tabungan.

P : Berapa suku bunga kredit yang diberikan?

I : Pinjaman semenjak pbh ada 2 yakni SPP dan sekarang ada individu suku bunga yang dikenakan sama yakni 1,5% menetap selama maksimal 3 tahun sesuai proposal, perbedaan individu dengan spp kalau spp ada iptwnya maksdnya bunga yang disetorkan jika lancar mendapatkan insentif pengembalian tepat waktu 20% dari bunga yang disetorkan dan tidak menggunakan jaminan. Sedangkan kalau individu memakai jaminan dan tidak ada IPTWnya.

P : Apa yang menjadi latar belakang UPK Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar menggunakan sistem *Tanggung Renteng* dalam pengelolaan DAPM?

I : Sistem tanggung renteng ini sudah ada dari program PTO eks PNPM pengelolaan dana bergulir. Karena ini sifatnya pemberdayaan masyarakat dan programnya harus membentuk kelompok. Dahulu kita mengenal dengan sistem gotong-royong yang artinya saling bantu membantu untuk kemajuan bersama dan meningkatkan tanggungjawab diantara kelompok. Karena dari kelompok setiap ada permasalahan pada kelompok diselesaikan dengan dana tabungan atau dana mengendap yang biasanya dipegang oleh ketua kelompok SPP.

P : Bagaimanaa pengelolaan DAPM dengan sistem *Tanggung Renteng*?

I : Apabila ada tunggakan dikelompok itu oleh 1 orang maka dipertanggung jawabkan/ diselesaikan oleh semua kelompok itu, misalnya ada satu anggota yang mengalami tunggakan maka anggota kelompok yang lain membantu dengan cara urunan.

P : Apa dampak pengelolaan DAPM dengan menggunakan sistem *Tanggung Renteng*?

I : Dampaknya ya mengurangi resiko kemacetan.

P : Apakah sistem tanggung renteng ini ada hubungannya terhadap administrasi pengelolaan keuangan pada UPK Duta Harta Lestari ini pak?

I :Nggih dik, Terkait administrasi pengelolaan yang kita lakukan ada hubungannya dengan sistem tanggung renteng niki, karena kan apabila adanya tunggakan pada salah satu anggota kelompok SPP niki ,dan mereka ingin mengusulkan dana kembali kami tidak akan memberikannya sampai kelompok ini mau melunasi kredit sebelumnya, ya pada intinya satu kelompok ini yang akan menanggung bersama.

3. Informan : Dewa Ketut Sumertadana

**(Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Duta Harta Lestari
Kecamatan Banjar)**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon izin untuk mewawancari bapak.

I : Om swastyastu selamat pagi, silahkan.

P : Bagaimana Sistem pengelolaan dana DAPM baik dari pencatatan/laporan keuangannya?

I : pencatatan yang digunakan pertama kita menggunakan manual dan kita juga ada sistem online yang dikoordinir oleh PT. Asta Brata Yogyakarta dalam bentuk sistem akuntansi, ada dua sistemnya yaitu standar akuntansi dan standar operasional prosedur ,kita dari tahun 2003 perencanaannya dan realisasi kegiatan tahun 2004 yang dinamakan PKK.

P : Apakah dalam penyusunan neraca program sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan?

I : Dalam penyusunan neraca program kita sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dimana terdapat aktiva dan pasifa. aktiva yang dimaksud nika kekayaan yang berupa kas, bank, pinjaman spp, biaya dibayar dimuka, inventaris, alokasi dana kegiatan dalam proses, dan alokasi dana kegiatan serah terima. Sedangkan pasifa kewajiban dan modal seperti hutang, modal, surplus ditahan, serta surplus/ deficit tahun berjalan.

P : Bagaimana penyusunan laporan operasional pada UPK DAPM kecamatan Banjar?

I : Penyusunan yang kami lakukan pada laporan operasional nike terdapat unsur yang berkaitan langsung dengan laporan operasional diantaranya berupa pendapatan, biaya, dan surplus/ deficit baik itu termasuk operasional maupun non operasional.

P : Bagaimana pelaksanaan pembuatan laporan DOK (Dana Operasional Kegiatan) pada UPK?

I : Dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan microfinance pada UPK kami dapat menentukan pada pola administrasi yang telah ada seperti halnya buku kas harian, atau biasanya kami membuat administrasi dengan jurnal

P : Kepada siapakah pertanggung jawaban laporan keuangan dari UPK DAPM ?

I : kepada masyarakat , pertama kita ke BPP dlu beliau yang akan bertanggung jawabkan kepada masyarakat kita selaku pengelola ada BPnya kita sampaikan kemereka nanti mereka yang melaporkan ke masyarakat sekecamatan banjar.

P : Bagaimana proses penggunaan dana bergulir nike pak nggih?

I : Proses penggunaan dana nike kalau dulu di PNPM dan PPK nike kita tetep ada istilah perengkingan dimana setiap desa mengajukan usulannya nnti desa yang membahas mana yang membutuhkan dan mana yang sangat mendesak ada kriterianya, sehingga tidak uju-uju desa yang lebih besar mendapat bantuan. Tetapi tergantung bagaimana mempersentasikan usulan dan kebutuhan dia dari masing- masing desa. Dulu yang bisa mempersentasikan dan bisa mempertanggungjawabkan itu yang paling sering dapat, harus tetap berkompetisi dan tetep bermusyawarah karena dana yang terbatas tidak semua

usulan dapat didanai.

P : Sebelum dilakukannya pencairan dana apakah ada pembekalan terlebih dahulu kepada kelompok SPP?

I : Nggih dik, kami UPK berkolaborasi dengan pemerintah desa, ketika dana bergulir cair dilakukan proses pencairannya di Kantor Desa dan kelompok SPP yang mendapat dana bergulir tersebut harus semuanya hadir .sebelum mencairkan uang, kepala desa melakukan briefing dulu kepada seluruh kelompok SPP . “ ini uang pinjaman dengan angsuran sekian dan meyakinkan mereka sanggup tidak didalam membayar uang tersebut” dan pastinya kami juga menerangkan kepada kelompok mengenai surat pernyataan tanggung renteng yang ada didalam proposal Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Perguliran.

P : Apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses pengembalian pinjaman dana sebagai modal usaha oleh kelompok SPP?

I : Pertama anggota ada yang meninggal dunia, kedua tidak adanya etiked baik didalam membayar, ketiga karena pandemic covid -19 ini adalah yang paling dominan, dan terakhir uang disalah gunakan oleh ketua kelompok uang tidak disetor tapi dipakai untuk keperluan pribadi hanya beberapa sih dan tidak semua.

P : Bagaimana strategi UPK DAPM dalam menangani permasalahan pengembalian pinjaman dana sebagai modal usaha oleh kelompok SPP?

I : Pertamakan ini sangat bergantung pada kondisi orang ya yang bersangkutan akan berbeda dengan ketika macet itu ia punya uang tapi tidak mau membayar ya seperti yang dijelaskan tadi, solusinya ya melakukan penyadaran disisi lain

ya kita jujur saja kita katakan bahwa program ini adalah pemberdayaan disisi lain juga tidak ada anggunan atau jaminan yang kita pegang untuk solusi supaya tidak kredit macet, idealnya kan begitu tapi kita tidak punya jaminan sehingga dalam pemberdayaan itu yang ditekankan ya penyesuaian, Maka dari itu kita menggunakan tanggung renteng dan ini juga sifat dananya dana hibah, arahnya bukan untuk profit oriented lebih ke social sehingga Nampak sekali tidak boleh adanha jaminan termasuk penanggungan tunggakan itu sangat lemah maka kita melakukan persuasive (pendekatan).



4. Informan : Putu Sumerjaya

(Ketua Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) Kecamatan Banjar)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon izin untuk mewawancari bapak

I : Om swastyastu selamat pagi, nggih.

P : Ijin bertanya mengenai jabatan bapak disini sebagai apa ya? dan sejak kapan bapak mulai menjabat ?

I : Saya menjabat sebagai ketua BPP, dan saya sama seperti pengurus UPK mulai bekerja tahun 2003.

P : Baik pak, lanjut untuk pertanyaan berikutnya pak nggih, apa yang melatarbelakangi UPK menggunakan sistem tanggung renteng pak?

I : Pelaksanaan sistem tanggung renteng ini merupakan perwujudan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupakan nilai – nilai bangsa yang patut kita pertahankan keberlangungannya. pada UPK Duta Harta Lestari sistem tanggung renteng ini diterapkan untuk saling tolong menolong diantara sesama anggota kelompok yang dapat mengikatkan diri dalam satu ikatan.

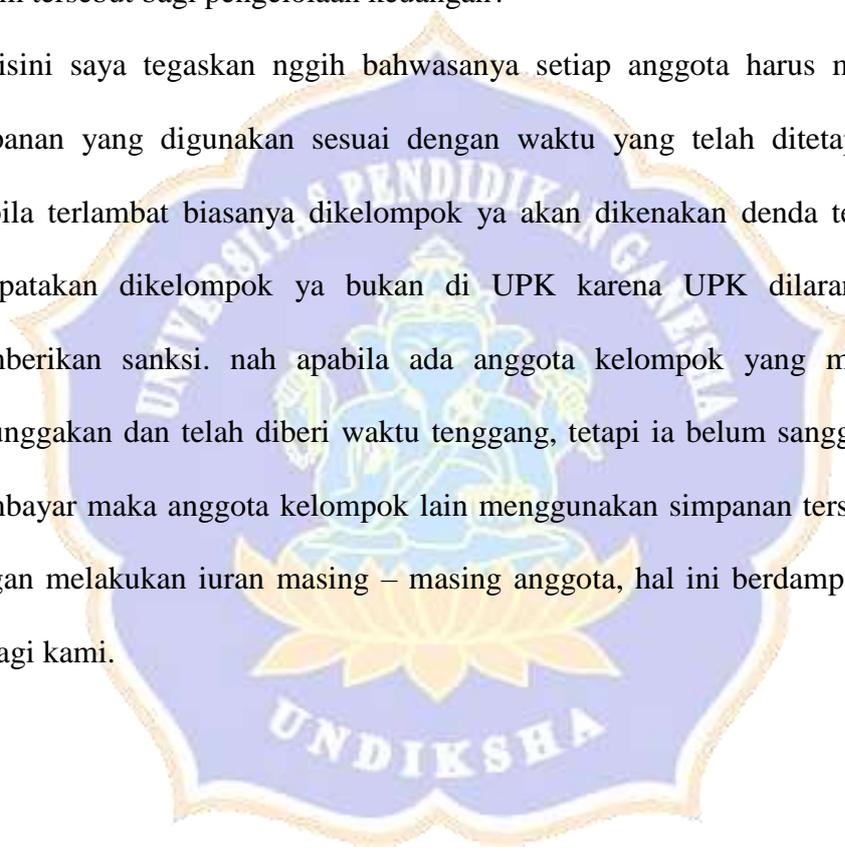
P : Bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UPK Duta Harta Lestari pak?

I :Pengurus harian UPK Duta Harta Lestari nantinya membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada BKAD

(Badan Kerjasama Antar Desa)/MAD (Musyawarah Antar Desa) sesuai dengan kebutuhan...Nah bahan dari laporan niki yang nantinya disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung ya, satu minggu sebelum pelaksanaan ini.

P : Bisa dijelaskan pak nggih terkait iuran/simpanan yang dilaksanakan pada Kelompok SPP dikecamatan Banjar niki bagaimana, dan apakah dampak dari sistem tersebut bagi pengelolaan keuangan?

I : Disini saya tegaskan nggih bahwasanya setiap anggota harus membayar simpanan yang digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan apabila terlambat biasanya dikelompok ya akan dikenakan denda tergantung kesepakatan dikelompok ya bukan di UPK karena UPK dilarang untuk memberikan sanksi. nah apabila ada anggota kelompok yang mengalami penunggakan dan telah diberi waktu tenggang, tetapi ia belum sanggup untuk membayar maka anggota kelompok lain menggunakan simpanan tersebut atau dengan melakukan iuran masing – masing anggota, hal ini berdampak positif ya bagi kami.



5. Informan : Sang Putu Suyadnyana

(Sekertaris Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) Kecamatan Banjar)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon izin untuk mewawancari bapak

I : Om swastyastu selamat pagi, nggih.

P : Mohon maaf bapak sebelumnya saya mau bertanya jawaban bapak disini sebagai apa pak nggih?

I : Jabatan tyang sebagai sekertaris BPP.

P : Baik pak, saya lanjutnya ke pertanyaan berikutnya bagaimana realisasi pencairan dana bergulir pada UPK Duta Harta Lestari nike pak?

I : Realisasi pencairan untuk dana bergulir nike biasanya dicatat dulu apabila telah terjadinya pengeluaran secara pasti dari rekening kas umum negara/daerah yang biasanya nike ditandai dengan dikeluarkannya SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan baru.

P : Bagaimana dampak pengelolaan DAPM dengan menggunakan sistem tanggung renteng pak nggih?

I : Tanggung renteng pada kenyataannya ya sudah sedikit kelompok yang mau menjalankan, mereka memilih apatis dikarenakan kelompok yang dibuat berdasarkan kesamaan usaha bukan usaha bersama, kalau usaha bersama kan

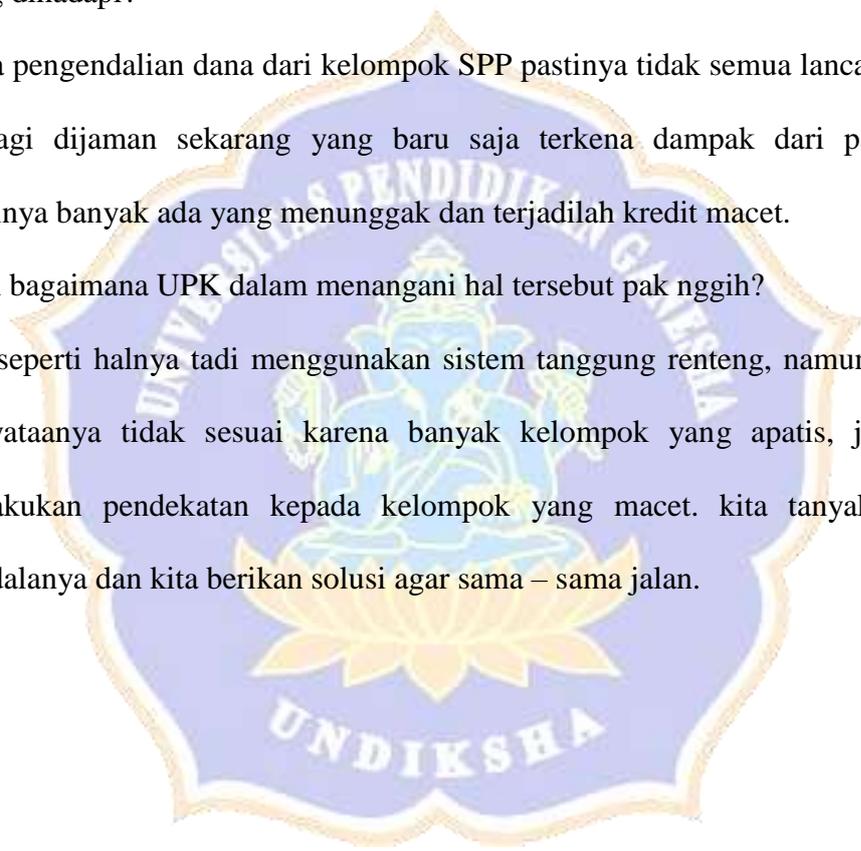
mengembangkan usaha bersama dan mereka bertanggung jawab secara bersama- sama, sedangkan di UPK Kecamatan Banjar nike lebih banyak pada kesamaan usaha, kan pada kesamaan usaha beda-beda hasilnya ada yang bisa membayar ada yang tidak bisa membayar, maka dari itu ada beberapa yang macet dan sistem tanggung renteng nike tidak mau digunakan oleh kelompok

P : Didalam pengembalian dana dari kelompok SPP kepada UPK adakah kendala yang dihadapi?

I : Pada pengendalian dana dari kelompok SPP pastinya tidak semua lancar nggih, apalagi dijamin sekarang yang baru saja terkena dampak dari pandemic pastinya banyak ada yang menunggak dan terjadilah kredit macet.

P : Dan bagaimana UPK dalam menangani hal tersebut pak nggih?

I : Ya seperti halnya tadi menggunakan sistem tanggung renteng, namun karena kenyataanya tidak sesuai karena banyak kelompok yang apatis, jadi kita melakukan pendekatan kepada kelompok yang macet. kita tanyakan apa kendalanya dan kita berikan solusi agar sama – sama jalan.



6. Informan : Ir. Ketut Suwitri

(Bendahara Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) Kecamatan Banjar)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Om swastyastu, selamat pagi , mohon ijin untuk mewawancari Ibu

I : Om swastyastu selamat pagi, nggih

P : ijin bertanya mengenai jabatan ibu disini sebagai apa ya? dan sejak kapan ibu mulai menjabat ?

I : Saya menjabat sebagai Bendahara BPP, dan saya mulai bekerja tahun 2003.

P : Baik Bu, selanjutnya saya ijin bertanya mengenai laporan keuangan yang dibuat apakah sudah sesuai dengan SAK?

I : Untuk laporannya niki sudah sesuai dengan peraturan standar akuntansi , kita manual catat online juga catat karena sudah ada niki bentuk sistem akuntansi.

P : Bagaimana tahap perencanaan yang dibuat didalam pengelolaan keuangan UPK?

I : Perencanaan yang kita buat dimulai dari Menyusun RAB dan Rencana Kerja yang nantinya akan kita sampaikan melalui musyawarah, karena kita mengedepankan nilai dari tanggung renteng yakni transparan dan kekeluargaan maka semuanya harus dilakukan secara musyawarah dengan melakukan beberapa tahapan perencanaan perguliran dana, apabila disetujui maka itu yang menjadi pegangan untuk menjalankan operasional kita.

P : Bagaimana penyusunan klasifikasi pada neraca program UPK Duta Harta Lestari ?

I : Untuk UPK Duta Harta Lestari ini ya..penyusunan urutan klasifikasi kekayaannya (kas, bank, pinjaman, biaya dibayar dimuka, inventaris, alokasi kegiatan dalam proses) berdasarkan urutan yang cepat menjadi uang tunai (likuidasi) dan urutan klasifikasi kewajiban (hutang), dan modalnya berdasarkan urutan jatuh tempo dilaporkan dalam Neraca Program nike.



7. Informan : Kadek Sukarpeni

(Ketua Kelompok SPP Mekar Sari 3)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Selamat Pagi Ibu, mohon izin untuk mewawancari Ibu

I : Nggih dik

P : Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saya lanjut saja bu nggih pertanyaan pertama. Tahun berapa Ibu menjadi anggota SPP?

I : Sekitar tahun 2007

P : Apa tujuan mengajukan pinjaman SPP?

I : Untuk menambah modal usaha kelompok ini dik.

P : Digunakan untuk apa saja dana yang diperoleh dari pinjaman SPP?

I : Seperti yang tadi tyang jelaskan nggih dana yang diperoleh ini digunakan untuk modal usaha pada kelompok SPP nike.

P : Apa saja yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam pengembalian dana pinjaman/ angsuran oleh anggota kelompok SPP kepada UPK DAPM?

I : selama ini tidak terlalu banyak kendala , Cuma disaat penyeteran saja kita punya keterlambatan dikarena anggota yang belum bisa membayar angsuran tepat waktu.

P : Apakah setelah bergabung dengan anggota kelompok SPP dapat membantu perekonomian keluarga?

I : Sangat membantu, kita bisa membantu keuangan keluarga , bisa membantu biaya sekolah anak – anak. karena kita pinjam disini kan tanpa adanya jaminan Cuma kita buat kelompok dengan menyeter KTP sama KK proses proposal diverifikasi dan cair lah dananya. makanya temen – temen kelompok nau lah meminjam dana di UPK.

P :Apa saja kegiatan kelompok SPP dalam pertemuan kelompok setiap bulannya?

I : Kita nerima tabungan dan memungut angsuran, kadang kita bertukar jualan ,sambil jualan kita kumpul.

P :Apa saran dan harapan sebagai ketua kelompok SPP untuk pihak UPK Duta Harta Lestari?

I : diprosesnya lebih cepat karena kita kelompok sehat ya tolonglah proses pencairannya lebih dipercepat minimal lah 10 hari, biar anggotanya tidak ada yang mengeluh.

P :Apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK Dutas Harta Lestari sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengelolaan keuangan, dan bagaimana penilaian ibu terkait pertanggungjawaban dari UPK kepada Masyarakat?

I : Astungkare sesuai dan pertanggungjawaban dari UPK menurut tiang sudah baik ya, keuangan sudah disampaikan dengan terbuka saat rapat , jika adanya masalah seperti tunggakan tiang sebagai kelompok secara langsung dapat mengetahuinya dan dapat menilai. kami kelompok SPP juga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah mengenai keuangan kelompok..

P : Sebelumnya saya telah mewawancarai kelompok lain bu nggih, terkait dana mengendap yakni menaiki bunga dari UPK . misalnya UPK memberikan bunga sebesar 1,5%, nanti ketua kelompok menaikinya sebesar 0,5% sehingga

anggota membayar bunga 2%. apakah cara tersebut juga sama dilakukan pada kelompok ibu?

I : Kalau dikelompok ibu , kasian terhadap anggota kelompok. upk memberikan bunga 1,5% kita tetep 1,5% tidak menambahkan bunga lagi karena orang kita sama – sama ga punya dan sama sama usaha. terus kalau ada SHU (Sisa Hasil Usaha) kita bagi bersama pertahun, kan semangat jadinya anggota kelompok mendapat bagian, selain itu juga kelompok ibu punya dana mengendap (cadangan) melalui tabungan suka rela berapa dia minat nabung segitu kita masukan (sesuai kemampuan) dan tidak dipaksakan.



8. Informan : Ketut Suasti

(Anggota Kelompok SPP Cempaka)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Selamat Pagi, mohon ijin untuk mewawancarai ibu..

I : Selamat Pagi nggih

P : Tahun berapa Ibu menjadi anggota SPP?

I : tyang sejak tahun 2008

P : Apa tujuan mengajukan pinjaman SPP?

I : Tyang kan memiliki usaha dik nggih kadang modal tyang sedikit , maka dari itu tyang mengajukan pinjaman agar bisa nike membantu usaha tyang biar tetep lancar dan astungkare bisa mengembangkan usaha yang tyang miliki.

P : Digunakan untuk apa saja dana yang diperoleh dari pinjaman SPP?

I : Mengembangkan usaha tyang dik.

P : Apa saja yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam pengembalian dana pinjaman/ angsuran oleh anggota kelompok SPP kepada UPK DAPM?

I : Hambatannya ya seperti sekarang kan pandemic ya banyak orang yang kerja dikota kena PHK dan memulai bisnisnya dikampung dengan menjatuhkan harga , sehingga menjadi saingan kami sebagai usaha yang sudah dari lama ada . Usaha kami jadi sepi pendapatan sehingga didalam melalukan pembayaran kami terhambat.

P : Apakah setelah bergabung dengan anggota kelompok SPP dapat membantu

perekonomian keluarga?

I : Sangat membantu dik dan sangat dipermudah sekali.

P : Apa saja kegiatan kelompok SPP dalam pertemuan kelompok setiap bulannya?

I : kegiatannya ketua kelompok biasanya mengumpulkan uang angsuran niki dik.

P : Apa saran dan harapan sebagai anggota kelompok SPP untuk pihak UPK Duta Harta Lestari?

I : Saran dari tyang mungkin disaat pengambilan uangnya ketika verifikasi agar lebih dipercepat dan dapat mengefisienkan waktu, Harapan tyang semoga UPK Duta Harta Lestari semakin lancar dan semakin berkembang.

P : Apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK Dutas Harta Lestari sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengelolaan keuangan?

I : Menurut tyang sudah berjalan dengan baik nggih, kami anggota selalu diberitahu juga mengenai dana yang disalurkan berapa dan kemana jadi sangat transparan.

P : Mengenai Dana mengendap/ tabungan yang di jalan bagaimana nggih sistem yang ada dikelompok SPP ibu?

I : Dikelompok tiang membayar 2% kepada ketua dan nantinya ketua niki membayar ke UPK sebesar 1,5% karena bunganya 0,5% niki diendapkan untuk nantinya dijadikan dana cadangan apabila ada anggota yang lain tidak bisa membayar, selain itu uang dari bunga 0,5% niki bisa juga dipinjamkan ke anggota lain yang sedang membutuhkan uang sesuai niki dengan ketentuan yang dibuat oleh ketua kelompok SPP.

9. Informan : Luh Yuliani

(Anggota Kelompok SPP Angsoka)

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022

Waktu : 10.00 Wita

P (Peneliti)

I (Informan)

P : Selamat pagi bu, mohon ijin untuk mewawancarai ibu..

I : Nggih silahkan

P : Tahun berapa Ibu menjadi anggota SPP?

I : Saya masuk semenjak tahun 2007

P : Apa tujuan mengajukan pinjaman SPP?

I : Untuk Modal usaha saya dik

P : Digunakan untuk apa saja dana yang diperoleh dari pinjaman SPP?

I : ya untuk modal usaha biar lebih berkembang nika usaha saya yang mulanya dagangan saya sedikit biar mau dia bervariasi.

P : Apa saja yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam pengembalian dana pinjaman/ angsuran oleh anggota kelompok SPP kepada UPK DAPM?

I : Dari tyang astungkare bisa lancar dik walaupun je kadang usaha saya sepi tapi masih bisa diulehin untuk membayar tepat waktu.

P :Apakah setelah bergabung dengan anggota kelompok SPP dapat membantu perekonomian keluarga?

I : Dapat dik bisa membayar SPP Anak sekolah selain itu keperluan rumah tangga yang lain , ya bisa lah setidaknya membantu.

P : Apa saja kegiatan kelompok SPP dalam pertemuan kelompok setiap bulannya?

I : Kegiatan tiap bulan biasanya dikelompok ya mengumpulkan tabungan dan angsuran selain itu juga saya berbisnis dengan anggota kelompok yang lain.

P : Apa saran dan harapan sebagai anggota kelompok SPP untuk pihak UPK Duta Harta Lestari?

I : Sarannya agar UPK dapat memberikan pinjaman sesuai dengan usulan yang dilakukan oleh kelompok, terkadang kan ga bisa ya semua usulan diacc gitu, dan harapannya semoga UPK bisa membantu masyarakat miskin lebih banyak lagi.

P : Apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK Dutas Harta Lestari sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengelolaan keuangan dan bagaimana terkait pelaporan yang dilakukan oleh UPK?

I : Menurut saya pengelolaan keuangannya sudah baik nggih, waktu rapat akhir tahun nike dilakukan pelaporan akhir disetiap kelompok mengenai siapa saja yang menunggak dan nantinya pihak UPK dan kelompok spp lainnya melakukan musyawarah bersama untuk menyelesaikan permasalahan seperti tunggakan nike, menurut tiang sendiri sih, sistem yang digunakan ini nggih sangat baik dan transparan kita semua menjadi mengetahui tanpa adanya sembunyi-sembunyi, dan kelompok yang bermasalah nike dapat diberikan masukan maupun penyadaran agar mau dia untuk membayar angsuran dengan tepat waktu.

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Pengurus
UPK DAPM Duta Harta Lestari



Gambar 2. Dokumentasi Data
UPK DAPM Duta Harta Lestari



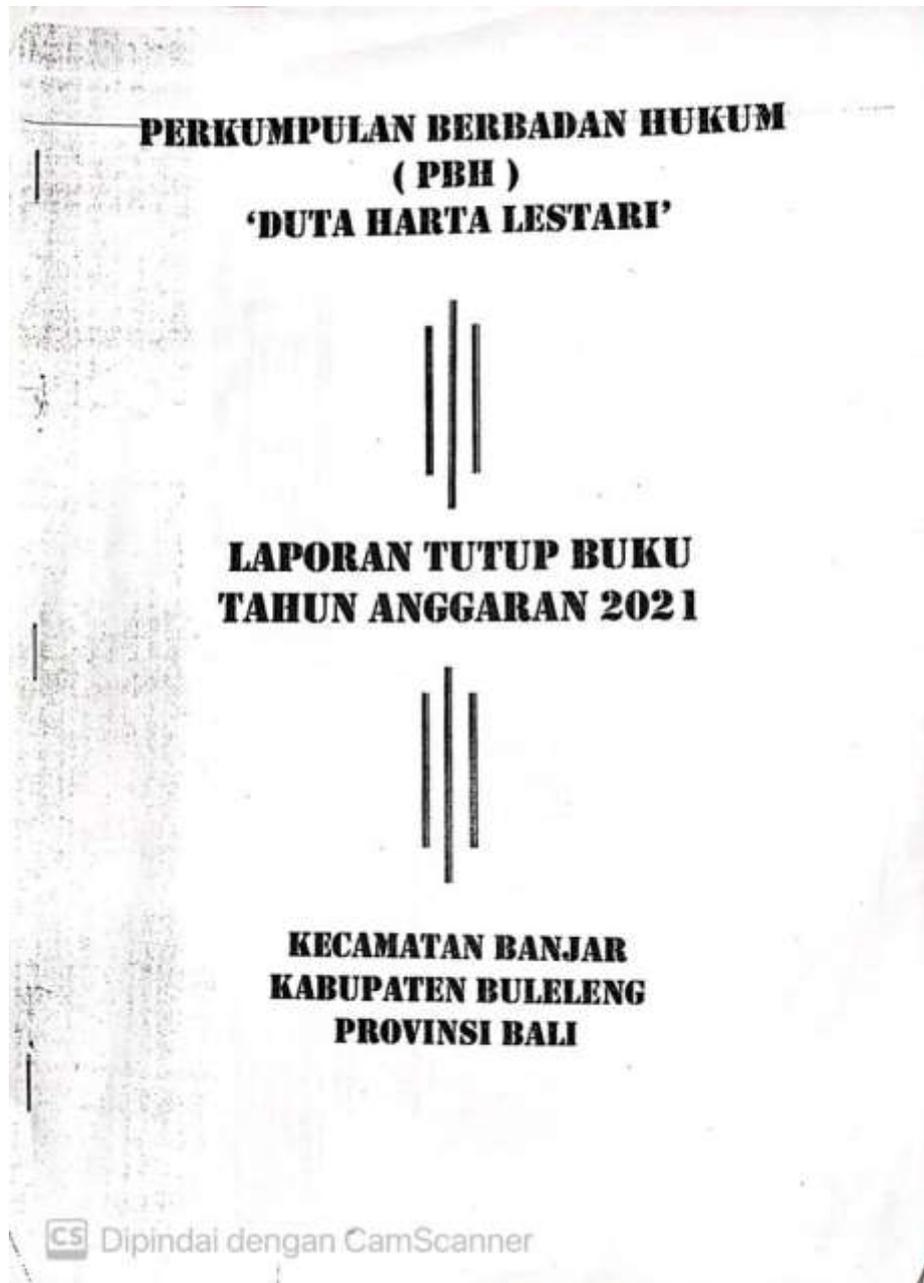
Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris
UPK DAPM Duta Harta Lestari



Gambar 4. Wawancara dengan ketua dan kelompok SPP
UPK DAPM Duta Harta Lestari

Lampiran 5. Dokumen UPK Duta Harta Lestari

- Laporan Tutup Buku

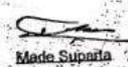


UNIT PENGELOLA KEGIATAN DUTA HARTA LESTARI
 KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
 Badan Hukum No.AHU - 0012763.AH.01.07 TAHUN 2017
 Banjar Buleleng Bali Telp. 03623361450

**LAPORAN PENDAPATAN DAN BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

U R A I A N	TOTAL BIAYA
4. REALISASI PENDAPATAN	
411. Pendapatan Operasional	298,854,500
411.01 Jasa Pengembalian SPP	18,612,000
411.06 Pendapatan Administrasi Pinjaman	238,030,000
411.08 Jasa Pengembalian DKU	
412. Pendapatan Non Operasional	753,377
412.02 Bunga Bank Pengembalian SPP	
413. Pendapatan Adm Simpanan	556,249,877
Total Realisasi Pendapatan	
5. REALISASI BIAYA	
512. Biaya Operasional	196,300,000
512.01 Honor Pengurus UPK	20,817,500
512.02 Administrasi dan Umum	2,500,000
512.03 Transport	15,593,361
512.05 Penyusutan Inventaris	1,500,000
512.06 BP-UPK	42,933,500
512.07 Tim Verifikasi	11,341,500
512.08 MAD Perkuliran/MAD Tutup Buku	22,802,000
512.10 Insentif Tepat Waktu IPTW	16,550,620
512.13 Amortisasi Bayar Dimuka	37,718,000
512.15 Tunjangan Pengurus UPK	6,700,000
512.18 Insentif BPP	
513. Biaya Penghapusan Pinjaman	0
513.01 Biaya penghapusan pinjaman	
514. Biaya Non Operasional	150,673
514.02 Pajak Pengembalian SPP	93,500
514.05 Adm Pengembalian SPP	
Total Realisasi Biaya	375,000,654
Surplus/SHU	181,249,223

Dilaporkan Oleh :
 Unit Pengelola Kegiatan DUTA HARTA LESTARI


 Made Suparta
 Ketua

Dewa Ketut Sumertadana
 Bendahara


 Drh. Ketut Suparta, Yasa
 Sekretaris


 Nyoman Budiani
 Staff UPK

Diperiksa Oleh:
 Badan Pengawas


 Sang Ayu Suciati



**PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM " DUTA HARTAB LESTARI
RINCIAN ALOKASI SURPLUS
TUTUP BUKU TAHUN ANGGARAN 2021**

PENDAPATAN SURPLUS TAHUN 2021		181,249,223
Beban / Cadangan Resiko	20%	36,249,845
SHU BERSIH		144,999,378
RINCIAN PEMBAGIAN SHU :	POSENTASE	JUMLAH
1. Untuk Penambahan Modal	50%	72,499,378
2. Kelembagaan Max	25%	36,250,000
3. Peningkatan Kapasitas	5%	7,250,000
4. Dana Sosial masyarakat miskin	15%	21,750,000
5. Jasa Produksi untuk pengelola	5%	7,250,000
JUMLAH	100%	144,999,378

Dilaporkan Oleh:
Unit Pengelola Kegiatan DUTA HARTA LESTARI



Drih Ketut Suparda Yasa
Sekretaris

Dewa Ketut Sumeradana
Bendahara

Diperiksa Oleh:
Badan Pengawas

Sang Ayu Suciani

Luh Sartini SH

Mengerahui
Badan Pengawas Kerkumpulan / BPP

Putu Sumelaya W. Ketut Suwrti Sang Puan Siswadyana

- Rencana Kerja

Kecamatan

: BANJAR

**RENCANA KERJA KELEMBAGAAN
DUTA HARTA LESTARI**

Kabupaten
Provinsi

: BULELENG
: BALI

NO	KEGIATAN	TUJUAN TARGET	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MUSYAWARAH KECAMATAN (MK) Tutup Buku 2021	Menyampaikan segala kebutuhan untuk pelaksanaan MK di tahun 2021	1 membuat Deviasi rencana Kerja kelembagaan Tahun Anggaran 2022 2 pelaksanaan Musyawarah Tutup Buku TA 2021 3 penyempaan Impormasi transporisasi UPPK menjadi Bumdesma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	penanggakan pinjaman bermasalah	Memekan Tunggakan bermasalah yang kollektibitas 4,5 dst	1 melakukan klarifikasi dan identifikasi 2 melaksanakan identifikasi permasalahan. 3 mengadakan MK khusus terhadap penanggakan sesuai dengan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah 4 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penanganan 5 menindak lanjut atas program dan evaluasi progres penanganan												
3	Sosialisasi kabupaten pembentukan Bumdesma Pelaporan penghitungan aset Reviu aset	Penyempaan Impormasi tentang pembentukan BUMDESMA	1 sosialisasi 2 pendataan 3 Pelaporan												
4	pemantauan pinjaman	Mengatasi tunggakan sedini mungkin demi terpeliharanya kwalitas pinjaman	1 Melihat dan menganalisa laporan perkembangan pinjaman (LPP) Secara Harlan 2 Menyampaikan pemberitahuan Laporan Perkembangan Pinjaman ke 17 Desa 3 Mengikuti penanganan masalah dan pembinaan kelompok.												

5	Rapat Koordinasi Mingguan dan konsolidasi internal kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 melakukan evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja sebelumnya 2 melakukan konsolidasi dengan kelembagaan 3 merumuskan rencana kerja dan tindak lanjut minggu selanjutnya 	
6	rapat rutin kelembagaan dan konsolidasi antar kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 sesuai dengan permohonan pimpinan bulan sebelumnya 2 Mengawasi jalannya rapat kelembagaan dan rapat pemutus. 3 Melakukan pemeriksaan kas masuk dan keluar 4 Memeriksa LPP bulanan 	
7	Pengembangan kelompok dengan pemertinan kelompok di Desa sesuai dengan ADRT dan SOP Kelembagaan Duta Harta Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan Sosialisasi secara continyu (Mustawarah Rapat Rapat) 2 Melakukan sosialisasi pemanaaat perguliran spp ke 17 desa. 	
8	Review SOP Kelembagaan Duta Harta Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1 review SOP pengelolaan Dana Bergulir 2 Review SOP penanganan Masalah Dana bergulir 	
9	Musyarah Desa Dan Antar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi 17 Desa 2 Musyawarah antar Desa 	
10	Pengawasan ketepatan kinerja LPP sepdz tertuang dalam SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1 mengecek daftar hadir kerja Mengawasi realisasi dana ke kelompok dan Individu. 	

ketua BPP

Putu Sumajaya



- Surat pernyataan tanggung renteng

UPK Kecamatan Banjar

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami wakil-wakil dari seluruh anggota kelompok SPP Banjar Dinas Desa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok SPP (Nama Anggota Kelompok Terlampir), dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan Kesanggupan untuk menanggung kewajiban dari anggota kelompok kami yang telah menerima dana PNPB untuk kegiatan SPP yang tidak dapat membayar kembali pinjamannya kepada UPK sebagaimana diperjanjikan dengan cara :

1. Memberi kuasa kepada UPK menarik atau memindahkan modal yang telah dimiliki oleh kelompok kami.
2. Jika seluruh modal tersebut tidak cukup untuk melunasi sisa pokok dan bunga yang telah jatuh tempo pelunasannya maka kami dan seluruh anggota kelompok bersedia akan memberikan urunan secara merata sampai semua tunggakan dan kewajiban lainnya dari anggota kami yang mendapatkan pinjaman lunas yang terbayarkan ke UPK. Ketua / Pengurus kelompok kami akan bertanggung jawab atas kelancaran penyetorannya sesuai batas waktu yang disepakati dengan UPK.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Nama- Nama Anggota Kelompok

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
21			21

.....2022

Mengetahui
Perbekel

Ketua Kelompok

Lampiran 6. Riwayat hidup penulis

RIWAYAT HIDUP



Putu Lisya Monica Utama lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2000. Anak pertama dari 5 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Made Lanang Budi Utama, S.E dan Ibu Kadek Sri Moni, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Alamat penulis di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 4 Kampung Baru dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Singaraja mengambil jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja dengan mengambil Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Unit Pengelolaan Kegiatan Pada Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar)”

Lampiran 7 Pernyataan Keaslian Tulisan

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putu Lisya Monica Utama

Tempat, Tanggal Lahir : 13 April 2000

NIM : 1817051298

Program Studi : S1 Akuntansi

Jurusan : Ekonomi dan Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Pendidikan Ganesha

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Unit Pengelolaan Kegiatan Pada Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar)” adalah karya tulis sendiri baik bagian keseluruhan, terkecuali bentuk kutipan yang dibuatkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Putu Lisya Monica Utama

NIM : 1817051298